



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

SELASA, 23 APRIL 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Uang dana desa digunakan untuk karaoke

RBI, BENGKULU - Persidangan kasus dalam penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2016 lalu, kemarin Senin (22/04) digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Terungkap dalam sidang, uang anggaran dana desa diduga digunakan untuk keperluan pribadi Kepala Desa. Terdakwa bernama Sarkani yang saat itu jabat Kades Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dia diduga menyalahgunakan uang dana desa dengan KN (Kerugian Negara.red) sebesar Rp 479 juta dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan.red) audit Inspektorat Pemda setempat. Dirinya bersama Bendahara Efendi disidang yang diketuai hakim Jonner Manik, SH. Dalam pengakuannya, Sarkani tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran dari penggunaan anggaran dana desa tersebut. Menariknya lagi, terdakwa mengaku bodoh sehingga salah satu anggota hakim sempat kesal dan membentak terdakwa Sarkani dalam persidangan. Keduanya diduga telah menggunakan uang yang akan dibangun untuk mengerjakan Jalan Rabat Beton selain itu

pekerjaan swadaya kelola pos jaga kamling, pekerjaan fisik wc umum yang belum selesai dan pembangunan fisik gedung gudang desa. Pantauan dalam persidangan, terdakwa Sarkani tampak berbelit-belit menjawab pertanyaan dari para hakim. "Kalian buktikan kalau sudah ada surat buktinya.

Kalau lagi joget, kalian lupa semua Bapak ini main benar saja," ujar salah satu anggota Hakim dalam persidangan.

Saat diwawancarai Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Utara Fardhana Kusumah, SH mengatakan keduanya diduga melakukan penyelewengan dana desa akibatnya dalam pemeriksaan tidak dapat memberikan bukti pertanggung jawaban. Ia pun membenarkan, dari hasil BAP jajaran Kepolisian jika Terdakwa Sarkani mengaku menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. "Kalau dari persidang para

terdakwa, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dan kurang volume.

Keterangan Sarkani uang tersebut membayar utang dan keperluan sehari-hari, dari Pemeriksaan BAP ada untuk karaoke namun dari terdakwa tidak mengakui," ujarnya. "Terdakwa Sarkani juga tidak dapat menunjukkan bukti dalam pemberian ke efendi, sebaliknya begitu. Kuitansi pembelian untuk pembangunan itu ada namun

tidak lengkap, kedua terdakwa ini belum ada berkeinginan mengembalikan kerugian," tambahnya. Dirinya pun mengimbau, agar masyarakat yang menjadi Kepala Desa agar dapat mengerti hukum. Selain itu, dapat mengikuti pendampingan khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan. "Sebelum menjadi kepala desa, harus mengetahui alokasi dana desa dan pertanggung jawaban anggaran itu," pungkasnya. (bro)